

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTERAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019

JL. Syech Nawawi Al Bantani No. 3 Km. 5

KOTA SERANG – Propinsi Banten

Telp. 0254-214085 Fax. 0254-214085

e-mail : ptun.serang@gmail.com



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
690202**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019
BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**JL. Syech Nawawi Al Bantani No. 3 KM.5
Telp. 0254-214085 Fax. 0254-214085
SERANG - Banten 42126
e-mail : ptun.serang@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 10 Februari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

NURHASANAH, SH
NIP.196703081987032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.....	21
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	21
A.3. Basis Akuntansi	22
A.4. Dasar Pengukuran	22
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	31
B.1. Pendapatan	31
B.2. Belanja.....	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	35
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	35
C.3. Persediaan.....	36
C.4. Tanah.....	36
C.5. Peralatan dan Mesin	37
C.6. Peralatan dan Mesin Belum Diregister	37
C.7. Gedung dan Bangunan.....	38
C.8. Jalan, Irigasi dan Bangunan.....	38

C.9.	Aset Tetap Lainnya	39
C.10.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	39
C.11.	Aset Tak Berwujud	40
C.12.	Utang Kepada Pihak Ketiga	40
C.13.	Uang Muka dari KPPN	41
C.14.	Ekuitas.....	41
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	41
D.2.	Beban Pegawai	42
D.3.	Beban Persediaan	42
D.4.	Beban Barang dan Jasa	43
D.5.	Beban Pemeliharaan	44
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	44
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	45
D.8.	Kegiatan Non Operasional	45
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	46
E.1.	Ekuitas Awal	46
E.2.	Surplus (defisit) LO	46
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	46
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	46
E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	47
E.5.	Ekuitas Akhir.....	47
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	48
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	48
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	48
	Laporan-laporan Pendukung.....	50
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	51
	Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual	53

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

JL. Syech Nawawi Al Bantani No.3 KM. 5. SERANG - Banten 42126

Telp. 0254-214085 Fax. 0254-214085

e-mail : ptun.serang@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester II Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2019 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester II Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2019 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

SERANG, 10 Februari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

NURHASANAH, SH
NIP.196703081987032001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester II Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 26.082.100 atau mencapai 118,56 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 22.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp 31.800.000 atau mencapai 78,04 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 40.750.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2011 sebagaimana telah

diubah dengan 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 0,- ; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp.0,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 26.082.100 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 52.952.340 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.26.870.240). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(DEFISIT) sebesar Rp.0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp. 26.870.240).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp.0 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 26.870.240) kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp0 ditambah Koreksi Lain-Lain senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar 26.870.240 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp.0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
DAN 31 DESEMBER 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	22.000.000	26.082.100	118,56	10.386.200
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		22.000.000	26.082.100	118,56	10.386.200
B. Belanja Negara	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2. Belanja Barang	B.2.2.	40.750.000	31.800.000	78,04	35.300.000
3. Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Negara		40.750.000	31.800.000	78,04	35.300.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
NERACA
PER 31 Desember 2019 DAN 31 Desember 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		0	0
Aset Tetap			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Aset Lainnya			
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	0	0
Aset Lain-lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset	C.4. 3.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	0	0
Jumlah Ekuitas		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	26.082.100	10.386.200
Jumlah Pendapatan		26.082.100	10.386.200
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	19.529.040	17.942.400
Beban Barang dan Jasa	D. 4	28.800.000	32.300.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	4.623.300	2.757.700
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Jumlah Beban		52.952.340	53.000.100
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(26.870.240)	(42.613.900)
Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 11	0	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(26.870.240)	(42.613.900)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA SERANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(26.870.240)	(42.613.900)
Ekuitas	E. 3		
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.4	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	26.870.240	42.613.900
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E. 4.1	31.800.000	35.300.000
Diterima Dari Entitas Lain	E. 4.2	(26.082.100)	(10.386.200)
Kenaikan/penurunan ekuitas		0	0
Ekuitas Akhir		0	0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terletak di Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 3 KM. 5 Serang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan),

dank as yang dibatasi penggunaannya. KM.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melaksanakan isi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2019	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	22.000.000	22.000.000
Jumlah Pendapatan	22.000.000	22.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	40.750.000	40.750.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	40.750.000	40.750.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan Rp.
26.082.100*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 26.082.100 atau mencapai 118,55 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp22.000.000. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terdiri dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNB

No.	Uraian	2019		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7.000.000	641.000	9,15
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	7.000.000	6.140.000	87,71
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	8.000.000	19.301.100	241,26
	Total Pendapatan	22.000.000	26.082.100	118,55

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan TA 2017

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	641.000	135.000	26,67
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	6.140.000	4.080.000	198,05
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19.301.100	6.171.200	47,00
	Total Pendapatan	26.082.100	10.386.200	66,17

B.2. Belanja

*Realisasi Belanja
Negara :
Rp31.800.000*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 31.800.000 atau sebesar 78,04% dari anggaran senilai Rp40.750.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2019 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018

Uraian	2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	40.750.000	31.800.000	78,04
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	40.750.000	31.800.000	78,04
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Total Belanja Netto	40.750.000	31.800.000	78,04

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 20,7 persen. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Adanya penurunan anggaran pada jasa pos pelayanan bantuan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018

Uraian	31 Desember TA 2019	30 Desember TA 2018	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	31.800.000	35.300.000	(20,7)
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja	31.800.000	35.300.000	(20,7)

B.2.1. Belanja Pegawai*Realisasi Belanja
Pegawai : Rp0*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0

B.2.2. Belanja Barang*Realisasi Belanja
Barang :
Rp31.800.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.800.000 dan Rp. 35.300.000. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar 20,7% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember TA 2018.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	31.800.000	35.300.000	0
Belanja Jasa	0	0	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	0	0	0
Total Belanja Brutto	31.800.000	35.300.000	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	31.800.000	35.300.000	0

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal :Rp0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tata Usaha Negara Serang TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0

*Belanja Peralatan
dan Mesin :Rp.0*

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 adalah sebesar Rp.0,

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2019 dan 2018*

Uraian	Realisasi TA 2019	Realisasi TA 2018	Naik (Turun)%
PC Unit	0	0	0,00
Laptop	0	0	0,00
Printer	0	0	0,00
Meubelair KDP	0	0	0,00
CCTV	0	0	0,00
Alat sidik jari	0	0	0,00
Televisi	0	0	0,00
Stabilisator	0	0	0,00
Gordyn / Krey	0	0	0,00
Lori dorong	0	0	0,00
Alat pemotong kertas	0	0	0,00
Vacum Cleaner	0	0	0,00
Mesin Poles Granit	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0,00

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.0*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2019 dan per 31 Desember TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2019 dan per 31 Desember 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018
Uang Tunai di Brankas	0	0
Uang di Bank	0	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0	0
Selisih Pembulatan	0	0
Jumlah	0	0

*Kas di
Bendahara
Penerimaan:
Rp0*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2019 dan per 31 Desember TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2019 dan per 31 Desember 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018
Uang Tunai di Brankas	0	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0	0
Selisih Pembulatan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan:
Rp.0

C.3. Persediaan

Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan per 31 Desember TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan per 31 Desember TA 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018
Barang Konsumsi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Total	0	0

Tanah: Rp.0

C.4. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Serang per 31 Desember TA 2019 dan per 31 Desember TA 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	0
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Selisih Revaluasi Aset	0
Transfer/Reklasifikasi Masuk	0
Mutasi Kurang	
Penghapusan	0
Transfer/Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2018	0

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Luas (m ²)	Lokasi	Jumlah
1.	-	-	0
Jumlah			0

Peralatan dan
Mesin :Rp0

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Peralatan dan
Mesin Belum
Diregister Rp.0

C.6. Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan
Bangunan Rp 0*

C.7. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	0
Revaluasi Aset	0
Koreksi Pencatatan	0
Mutasi Kurang	0
Revaluasi Aset	0
Koreksi Pencatatan	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Rincian asset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, irigasi
dan Bangunan
:Rp0*

C.8. Jalan, Irigasi dan Bangunan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi keluar	0
Saldo per 31 Desember 2019	0

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Rincian asset Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya: Rp. 0*

C.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp. 0*

C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat asset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud:
Rp0*

C.11. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Asset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, akan tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	0
Pembelian Anti Virus	0
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai Perolehan
Anti Virus	0
Jumlah	0

*Utang kepada pihak ketiga:
Rp.0*

C.12. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

C.13. Uang Muka dari KPPN*Uang Muka
dari KPPN:
Rp0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.14. Ekuitas*Ekuitas:
Rp 0*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional**D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak***Pendapatan
PNbp:
Rp26.082.100*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.26.082.100 dan Rp. 10.386.200. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018

Uraian	TH.2018	TH.2017	%
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	641.000	135.000	26,67
Pendapatan Ongkos Perkara	6.140.000	4.080.000	198,05
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19.301.100	6.171.200	47,00
Total Pendapatan	26.082.100	10.386.200	66,17

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp. 0*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0
Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0
Beban Uang Makan PNS	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0
Total Beban Pegawai	0	0	0

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp19.529.040*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.529.040 dan Rp. 17.942.400. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	19.529.040	17.942.400	8,84
Total Beban Persediaan	19.529.040	17.942.400	8,84

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp28.800.000*

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.800.000 dan Rp32.300.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Rincian Beban Jasa untuk TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	0	0
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	2.500.000	(100,00)
Beban Bahan	0	1.000.000	(100,00)
Beban Langganan Listrik	0	0	0
Beban Langganan Telepon	0	0	0
Beban Jasa Profesi	28.800.000	28.800.000	
Total Beban Barang dan Jasa	28.800.000	32.300.000	(10,83)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.4.623.300*

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp4.623.300,- dan Rp2.757.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.623.300	2.757.000	67,65
Total Beban Pemeliharaan	4.623.300	2.757.000	67,65

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp0*

Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang perpindahan dari gedung lama ke gedung baru. Rincian Beban Perjalanan untuk TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	0	0	0

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2019 dan 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Amortisasi Software	0	0	0
Beban Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional :
Rp0*

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2019 dan 2018

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	0	0	0
Surplus (deficit) Kegiatan Non Operasional	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp0 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan per 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : (Rp26.870.240) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp26.870.240) dan (Rp42.613.900). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp0 Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar Entitas : Rp26.870.240 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp26.870.240 dan Rp42.613.900. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	31.800.000
Diterima Dari Entitas Lain	(26.082.100)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	21.152.340
Jumlah	26.870.240

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp. (26.082.100) sedangkan DKEL sebesar Rp31.800.000.

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK pada laporan periode semester II Tahun Anggaran 2019 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat pendapatan dan belanja secara akrual pada laporan periode semester II Tahun 2019.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah :

1. BRI Cab. Serang A/C 0084-01-001999-30-5 a.n. BPG 020 PTUN SRG 689313 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.
2. Bank BRI Cabang Serang A/C 0084-01-002190-30-2 a.n. BPG 020 PTUN SRG 690202 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Serang A/C 0084-01-002657-30-4 a.n. RPL 020 PTUN SERANG UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.39.629.100.

F.2.4. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan semester II 2019 belum terdapat Revisi DIPA.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan semester II 2019 terdapat ralat SPM.

Ralat SPM pada SPM Nomor : 00015/GUPNIHIL/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018,
Ralat SPM semula 005.01.29.53.815111 menjadi 005.05.29.53.815111

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya yang dapat dijabarkan pada laporan keuangan semester II Tahun 2019 ini.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31-12-2018	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31-12-2018	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin						
Alat Bantu	7	0	0	0	0	0
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	0	0	0	0
Alat Angkutan Darat tak Bermotor	4	0	0	0	0	0
Alat Kantor	5	0	0	0	0	0
Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0	0
Alat Studio	5	0	0	0	0	0
Alat Komunikasi	5	0	0	0	0	0
Komputer Unit	4	0	0	0	0	0
Peralatan Komputer	4	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan						
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	0	0	0	0	0
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	0	0	0	0
Tugu atau tanda batas	50	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
Instalasi Gardu Listrik	40	0	0	0	0	0
Instalasi lain		0	0	0	0	0
Jaringan Listrik	40	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0

*B. INFORMASI PENDAPATAN
DAN BELANJA SECARA
AKRUAL*

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas
Laporan Keuangan

005

01

2900

097560

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NE
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUN

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}